



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.434, 2015

KEMKES. Pelayanan. Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus. Standar.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/1/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 473);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT KHUSUS.

Pasal 1

Ruang lingkup pengaturan Standar Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus meliputi:

- a. standar pelayanan keperawatan ibu dan anak;
- b. standar pelayanan keperawatan mata;
- c. standar pelayanan keperawatan kusta;
- d. standar pelayanan keperawatan ortopedi;
- e. standar pelayanan keperawatan penyakit infeksi;
- f. standar pelayanan keperawatan ginjal;
- g. standar pelayanan keperawatan kanker;
- h. standar pelayanan keperawatan jantung dan pembuluh darah;
- i. standar pelayanan keperawatan paru dan respirasi;
- j. standar pelayanan keperawatan stroke;
- k. standar pelayanan keperawatan *neuroscience*; dan
- l. standar pelayanan keperawatan ketergantungan obat, pada rumah sakit khusus dan rumah sakit umum yang memiliki pelayanan keperawatan kekhususan.

Pasal 2

Pengaturan Standar Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan di rumah

sakit khusus dan rumah sakit umum yang memiliki pelayanan keperawatan kekhususan yang disusun berdasarkan kompetensi dan kewenangan perawat dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang.

### Pasal 3

Standar Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus digunakan sebagai acuan bagi seluruh perawat dan pemangku kepentingan pada rumah sakit khusus dan rumah sakit umum yang memiliki pelayanan keperawatan kekhususan dalam memberikan pelayanan dan asuhan keperawatan yang komprehensif dan bermutu.

### Pasal 4

- (1) Setiap perawat di rumah sakit khusus dan di rumah sakit umum yang memiliki pelayanan keperawatan kekhususan wajib memenuhi standar pelayanan keperawatan di Rumah Sakit Khusus yang berlaku secara nasional.
- (2) Standar pelayanan keperawatan di Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

- (1) Menteri Kesehatan, Gubernur, Bupati/Walikota, dan pimpinan rumah sakit melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan standar pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Kesehatan, Gubernur, Bupati/Walikota, dan pimpinan rumah sakit dapat melibatkan organisasi profesi terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan manajemen pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus dan di rumah sakit umum yang memiliki pelayanan keperawatan kekhususan; dan
  - b. mengembangkan pelayanan keperawatan dan manajemen pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus dan di rumah sakit umum yang memiliki pelayanan keperawatan kekhususan yang efisien dan efektif.

- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. advokasi dan sosialisasi;
  - b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6

Pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dilaksanakan oleh instansi dan/atau petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2015  
MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 10 TAHUN 2015  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN KEPERAWATAN DI  
RUMAH SAKIT KHUSUS

STANDAR PELAYANAN KEPERAWATAN IBU DAN ANAK

BAB I  
PENDAHULUAN

Indikator kesejahteraan suatu negara salah satunya ditentukan oleh Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Didalam dokumen *Millenium Development Goals* (MDGs), target capaian AKI dan AKB tertuang dalam MDG-4 yaitu penurunan Angka Kematian Anak, bayi dan balita (IMR) menjadi 19/100.000 kelahiran hidup tahun 2015 dan MDG-5 menjadi 125/100.000 kelahiran hidup. Pencapaian target MDGs, salah satunya angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR) merupakan acuan penting yang mencerminkan komitmen Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya sekaligus menyumbang pada kesejahteraan masyarakat dunia.

Data-data pencapaian target, sebagaimana tertuang dalam dokumen laporan pencapaian tujuan millennium Indonesia 2011 (Bappenas, 2012), tergambar bahwa pencapaian tergambar bahwa status pencapaian target MDGs bidang kesehatan menunjukkan kemajuan. MDGs 4 (penurunan angka kematian Anak dan balita (IMR)): angka kematian balita mengalami penurunan menjadi 44 per seribu kelahiran hidup (tahun 2007): angka kematian bayi dari 68 menjadi 34 per seribu kelahiran: dan neonatal dari 32 menjadi 19 per seribu kelahiran. Sedangkan proporsi anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak meningkat dari 44.5 persen (tahun 1991) menjadi 87.30 persen (tahun 2011). Untuk MGDs 5 (Penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan: MMR) mengalami peningkatan proporsi kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih menjadi 81.25 persen (tahun 2011), namun disisi lain angka kematian ibu baru dapat ditekan menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup (tahun 2007); angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun dengan cara modern meningkat menjadi 60.42 persen (tahun 2011). Tahun 2009 sebanyak 226/1000 kelahiran hidup (BPS, 2009). Sedangkan angka kematian maternal di rumah sakit periode 2003-2008 sebesar 505 per 139,086 kelahiran hidup (Profil Kesehatan Depkes, 2009).